

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Teori Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan**

Menurut Yushita, Teori pengelolaan keuangan merupakan gabungan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan memiliki tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan. Pengelolaan keuangan merupakan proses pengelolaan dan pengaturan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh individu, keluarga, perusahaan, atau pemerintah (Yushita, 2023, h. 11).

Tujuan utama dari pengelolaan keuangan adalah untuk mencapai keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran serta meningkatkan nilai dari sumber daya keuangan yang ada. Pembangunan adalah proses yang mencakup usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup manusia melalui berbagai inisiatif dan intervensi. Pembangunan tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, politik, dan lingkungan. Pemerintah dan organisasi internasional sering berperan dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan.

Dalam konteks negara, pengelolaan keuangan dan pembangunan seringkali terkait karena dana yang dikelola dengan baik akan membantu mendukung program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perencanaan keuangan yang bijaksana dan pengelolaan sumber daya yang tepat akan menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan memahami kompleksitas dan tantangan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan, BPKP dapat berfungsi sebagai mitra strategis bagi

pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik, meningkatkan transparansi, dan menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial.

Pengelolaan keuangan dan pembangunan adalah dua aspek kritis yang saling terkait untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan infrastruktur. Pengelolaan keuangan publik adalah proses pengelolaan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh pemerintah. Hal ini mencakup penyusunan anggaran, pengumpulan dan pengeluaran pendapatan publik, serta pengelolaan utang negara.

Untuk menjaga keseimbangan anggaran, mengontrol pendapatan dan pengeluaran, dan menjamin akuntabilitas yang tepat untuk penggunaan dana publik, manajemen keuangan sangat penting. Manajemen keuangan yang baik dapat dicapai dengan akuntansi yang akurat, kontrol keuangan yang ketat, penganggaran yang realistis, dan pelaporan keuangan yang terbuka (Pasaribu, et al., 2023, h. 2-3).

Menurut ahmad sucardja Agenda pengawasan keuangan dan pembangunan yang berkelanjutan menempatkan fokus pada pencapaian tujuan pembangunan sambil menjaga keseimbangan dengan aspek lingkungan dan sumber daya alam. Penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan menjadi penting untuk menghindari dampak negatif jangka panjang yang Pemerintahan negara dilaksanakan sebagian melalui pemerintahan daerah. keuangan negara dan daerah, yang meliputi pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan tersebut, dilakukan sesuai dengan peran dan kewenangannya.

Kuangan menurut UU No. 22 tentang Pemerintahan, sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan, atas dasar otonomi. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Ilustrasi dari kemampuan pemerintah untuk menerapkan "good governance" adalah pengelolaan keuangan yang baik.

Kerangka kerja yang kokoh untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan sistem manajemen yang terencana dan terukur telah ditetapkan melalui Permendagri No. 21/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan mencapai tujuan sesuai dengan kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan sebagai pendekatan dalam penyusunan anggaran yang berfokus pada antara kebijakan dan alokasi sumber daya finansial (Harahap, 2017, h. 38).

Pengaturan hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien agar memiliki kualitas yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis. Oleh karena itu, dari sisi teoritis dan paradigmatik, keberadaan peraturan perundang-undangan sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah (Karianga, 2016, h. 14-15).

## **2. Teori Akuntabilitas**

### **a. Definisi Akuntabilitas**

Menurut pendapat Amrul (2018), Istilah akuntabilitas dalam bahasa Inggris, yang menunjukkan keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan, adalah asal kata akuntabilitas. Oleh karena itu, istilah akuntabilitas mengacu pada situasi atau keadaan yang dapat dijelaskan. Akuntabilitas pada dasarnya adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan mengungkapkan aktivitas dan hasil keuangan. Gagasan bahwa semua tindakan harus menjawab kepada orang atau organisasi yang memberikan otorisasi untuk melaksanakan suatu program adalah dasar dari konsep akuntabilitas.

Akuntabilitas diintegrasikan dengan prinsip tata kelola yang baik, Proses pengambilan keputusan yang terbuka dan inklusif, serta pemenuhan norma-norma etika, menjadi bagian dari kerangka kerja tata kelola yang mendukung akuntabilitas. Organisasi dan proyek pembangunan yang mendapatkan dukungan lintas batas harus mematuhi standar dan ketentuan yang ditetapkan oleh badan

pengawas internasional. Terakhir, membangun budaya akuntabilitas adalah upaya berkelanjutan.

Menurut Michael Jensen (2019), Meningkatnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan tidak hanya bergantung pada satu faktor saja, melainkan merupakan hasil dari kombinasi berbagai upaya, termasuk peningkatan transparansi, pengawasan yang efektif, partisipasi publik, serta reformasi kebijakan yang mendukung

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban, harus bertindak dengan cara yang sesuai dengan instruksi yang diberikan ketika mengambil keputusan. Kebijakan yang dihasilkan, yang mencakup kerugian daerah berupa berkurangnya kekayaan daerah baik berupa uang tunai, surat berharga, maupun barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan baik secara sengaja maupun lalai, harus dapat diakses dan dikomunikasikan dengan baik secara vertikal maupun horizontal (Soleh & Rochmansjah, 2020, h. 10).

Menurut Wiguna (2015) Menurut buku yang berjudul Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, kinerja pemerintah daerah akan meningkat ketika akuntabilitas dan transparansi digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena kinerja pemerintah akan dievaluasi berdasarkan pencapaian akuntabilitas dan transparansi, maka akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah, dan sebaliknya tidak.

Aspek-Aspek Akuntabilitas yang di katai baik yaitu :

1. Akuntabilitas berfokus pada hasil. Dalam hal ini, keberadaan prinsip akuntabilitas mengantisipasi hasil dalam bentuk perilaku mesin yang etis, adil, dan kreatif. Dalam situasi ini, setiap orang atau kelompok di dalam organisasi harus bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawab dan tugas mereka dan berusaha untuk membantu pencapaian tujuan.

2. Laporan diperlukan untuk akuntabilitas. Kemampuan untuk menggambarkan tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu lembaga, serta memberikan bukti yang dapat diverifikasi atas hasil tersebut, tersirat dari adanya laporan kinerja. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas seseorang diwujudkan dalam bentuk laporan yang berasal dari kontrak kerja, dan dalam institusi, laporan ini disebut sebagai LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

3. Bertanggung jawab memiliki dampak. Bertanggung jawab adalah sebuah kewajiban. Kewajiban akan menunjukkan bahwa ada tanggung jawab, dan tanggung jawab memiliki dampak. Dampak ini dapat berupa salah satu dari dua bentuk: memberi penghargaan atau menghukum individu atau kelompok tertentu dalam organisasi untuk melaksanakan tugas mereka.

4. Akuntabilitas meningkatkan keluaran. Akuntabilitas proaktif adalah pendekatan proaktif terhadap tanggung jawab, di mana akuntabilitas dipahami sebagai proses yang terencana dan hubungan yang bertujuan untuk mencapai tujuan. Dalam rangka meningkatkan kinerja, setiap orang atau kelompok di dalam sebuah institusi akan dimintai pertanggungjawaban dan secara aktif berpartisipasi dalam proses peninjauan.

Menurut Nasution (2017) dalam sebuah buku judul akuntabilitas & transparansi pengelolaan keuangan daerah, temuan itu menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh akuntabilitas. Kinerja pemerintah daerah kemudian dipengaruhi oleh transparansi (Edowai, et al. 2021, h. 60).

Teori Akuntabilitas merupakan suatu konsep dalam ilmu akuntansi yang menekankan pentingnya kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Konsep ini merujuk pada upaya untuk menciptakan dan memastikan adanya transparansi, integritas, dan kepercayaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya.

Akuntabilitas adalah prinsip yang mengharuskan individu atau organisasi untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, atau hasil kerjanya kepada pihak yang berkepentingan atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap tindakan tersebut. Dalam konteks organisasi atau pemerintahan, akuntabilitas adalah prinsip fundamental yang menunjukkan bahwa pemimpin atau entitas harus menjelaskan tindakan mereka kepada publik, pemegang saham, atau lembaga terkait. Ini bertujuan untuk memastikan transparansi, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan.

Seorang penulis buku berkaitan dengan manajemen dan sektor publik. Memberikan klarifikasi atas akuntabilitas merupakan salah satu tugas agen (pemerintah) untuk menetapkan jumlah harian, melaporkan, dan mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh lembaga serta kegiatan yang terkait erat dengan penggunaan dana public oleh masyarakat kepada principal (Mahmudi, 2020, h. 18).

Menurut dalam buku Mardiasmo Dalam rangka memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, akuntabilitas kinerja adalah merupakan kewajiban untuk menjelaskan mengapa misi organisasi tercapai atau tidak melalui media pertanggungjawaban yang teratur (Swasanany, 2020, h. 46).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seberapa baik kinerja instansi pemerintah dalam kaitannya dengan tujuan dan sasaran mereka. Kinerja juga menggambarkan visi, misi, dan strategi mereka serta menunjukkan seberapa baik atau buruknya mereka melaksanakan rencana operasional sesuai dengan kebijakan dan program yang ada. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah organisasi berhasil atau tidak berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, instansi pemerintah harus menerapkan metode akuntabilitas secara berkala. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengatur kebutuhan ini

Pentingnya akuntabilitas di sektor publik berasal dari fakta bahwa kinerja pemerintah didefinisikan sebagai produk akhir dari inisiatif atau program yang

dilakukan dalam hubungannya dengan penggunaan jumlah dan jenis pendanaan yang dapat diukur untuk kepentingan masyarakat umum. Kinerja dan akuntabilitas sektor publik terkait erat, dengan penekanan pada pencapaian tujuan secara efektif dan efisien serta mematuhi persyaratan hukum.

Akuntabilitas menunjukkan komitmen instansi pemerintah untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya melalui penyusunan laporan kinerja secara periodik, yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban seluruh instansi pemerintah kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam upaya mencapai tujuan organisasi sesuai dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan

Laporan kinerja ini memberikan ikhtisar yang jelas dan menyeluruh tentang capaian yang telah dilakukan sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Setelah itu, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dengan menggunakan laporan kinerja tersebut. Melalui hasil penilaian yang dilakukan dalam sistem tersebut, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat memberikan umpan balik atas perencanaan dan rincian atas sejumlah prosedur perencanaan yang mengarah pada pencapaian kinerja.

Seorang pembicara dan penulis berbagi pemikirannya. Ia mendefinisikan akuntabilitas sebagai sikap seseorang terhadap kehidupan dan karakter, yang mencakup akuntabilitas internal dan eksternal. Pertanggungjawaban seseorang kepada Tuhan adalah pertanggungjawaban internal. Akuntabilitas seseorang terhadap lingkungannya, yang meliputi atasan dan bawahan formal serta lingkungan yang lebih luas, merupakan aspek eksternal dari akuntabilitasnya (Saleh, 2020, h. 75).

Seorang penulis buku berbicara tentang akuntabilitas dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Dalam tulisan tersebut, ia menegaskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban setiap orang atau organisasi yang dipercaya untuk



mengelola keuangan publik, dan siapa pun yang tidak puas dengan hal itu dapat mengajukan kekhawatiran apa pun yang dapat membuat mereka lebih mudah menerima kritik (Arifiyadi, 2021. h. 58).

### **b. Tujuan dan Manfaat Akuntabilitas**

Tujuan dan manfaat dari akuntabilitas adalah menciptakan lingkungan di mana individu, organisasi, atau entitas lainnya harus bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan hasil kerjanya. Berikut adalah beberapa tujuan dan manfaat dari akuntabilitas:

1). Memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan terbuka dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan atau publik. Ini membantu mencegah penyimpangan, korupsi, atau praktik-praktik tidak etis.

Dalam konteks pemerintahan, transparansi berarti bahwa keputusan dan tindakan pemerintah harus diperlihatkan kepada publik. Ini termasuk proses legislasi, pembuatan kebijakan, penggunaan anggaran publik, dan lainnya. Ketika pemerintah transparan, keputusan mereka dapat diawasi oleh masyarakat, dan ini dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan akuntabilitas.

2). Membangun kepercayaan dalam hubungan antara individu, organisasi, dan masyarakat.

Dalam konteks instansi, kepercayaan juga memainkan peran penting dalam membangun lembaga sosial dan pemerintahan yang baik. Kepercayaan juga memainkan peran penting dalam membentuk budaya organisasi yang sehat. Ketika karyawan percaya pada pimpinan dan sesama rekan kerja, maka mereka akan bekerja dengan lebih efektif, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan mencapai hasil yang lebih baik.

3). Akuntabilitas dapat mendorong efisiensi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan.



Akuntabilitas adalah konsep yang penting dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan. Salah satu dampak positif dari adanya akuntabilitas adalah mendorong efisiensi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan. Ketika seseorang atau sebuah lembaga tunduk pada akuntabilitas, mereka menyadari bahwa mereka harus bertanggung jawab dan menjelaskan tindakan.

4). Memastikan bahwa individu atau organisasi yang melakukan tindakan yang salah atau melanggar hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Tanggung jawab hukum memberikan kerangka kerja untuk memastikan bahwa setiap individu atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini menciptakan kepastian hukum yang penting dalam masyarakat. Ketika orang atau entitas tahu bahwa mereka akan bertanggung jawab atas tindakan mereka, mereka akan lebih berhati-hati dan berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau etika. Ini membantu mencegah perilaku yang merugikan dan memastikan bahwa setiap orang atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan.

5). Akuntabilitas memungkinkan pembelajaran dan perbaikan. Ketika kesalahan terjadi, akuntabilitas memungkinkan untuk mengevaluasi apa yang salah dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya di masa depan.

Ketika kesalahan terjadi, akuntabilitas memungkinkan pihak terkait untuk mengidentifikasi dengan tepat apa yang salah. Dengan jelasnya tanggung jawab dan kewenangan di berbagai level dalam suatu organisasi, proses akuntabilitas memungkinkan untuk menentukan di mana kesalahan tersebut terjadi. Ini penting agar dapat memahami sebab-sebab terjadinya kesalahan dan memastikan bahwa evaluasi dilakukan dengan cermat. (Mahmudi, 2020, h. 44)

### **c. Prinsip dan aspek Akuntabilitas**

Beberapa prinsip dan aspek akuntabilitas :

1). Membuka informasi secara terbuka dan jujur mengenai tindakan dan keputusan yang diambil serta pengelolaan sumber daya.

Membuka informasi secara terbuka dan jujur adalah prinsip kunci dalam memastikan akuntabilitas. Ini berkaitan dengan keterbukaan dalam menjelaskan semua keputusan yang diambil, tindakan yang dilakukan, serta bagaimana sumber daya digunakan. Dengan keterbukaan ini, pihak terkait, termasuk masyarakat umum dan pemangku kepentingan lainnya, dapat memahami alasan di balik keputusan dan tindakan yang diambil.

2). Memastikan akuntabilitas terhadap masyarakat atau publik secara umum, terutama bagi entitas yang dibiayai oleh dana publik.

Akuntabilitas adalah konsep yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban. Ketika suatu entitas menerima dana publik, baik itu instansi pemerintah, lembaga amal, atau organisasi non-profit, ada kewajiban untuk bertanggung jawab secara jelas kepada masyarakat atau publik secara umum. Ini mencakup penyediaan laporan keuangan yang transparan serta rincian mengenai penggunaan dana publik tersebut.

3). Menyangkut kewajiban untuk keuangan yang akurat dan dapat dipercaya.

Kewajiban untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya adalah aspek kunci dari akuntabilitas. Ini memastikan bahwa entitas yang bertanggung jawab atas penggunaan dana publik memberikan laporan keuangan yang jelas, terperinci, dan akurat. Hal ini memungkinkan pihak terkait untuk mengevaluasi pengelolaan aset dan kewajiban finansial entitas tersebut.

4). Melibatkan pelaporan tentang pencapaian tujuan, hasil, dan kinerja organisasi dalam mencapai misi dan visi yang telah ditetapkan.

Pelaporan tentang pencapaian tujuan, hasil, dan kinerja organisasi merupakan salah satu cara untuk menunjukkan akuntabilitas. Dengan memberikan informasi mengenai sejauh mana tujuan dan hasil yang telah dicapai, entitas tersebut dapat menunjukkan dampak dari keputusan dan tindakan yang telah

diambil. Ini juga memungkinkan masyarakat atau publik untuk menilai sejauh mana entitas tersebut telah memenuhi misi dan visinya.

5). Akuntabilitas menciptakan kewajiban bagi individu, organisasi, atau pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik. Mereka harus memberikan pertanggungjawaban atas bagaimana dana tersebut digunakan, termasuk tujuan, alokasi, dan hasilnya.

Konsep ini menekankan bahwa entitas yang menerima dana publik memiliki kewajiban untuk menjelaskan bagaimana dana tersebut digunakan. Ini meliputi tujuan dari penggunaan dana, alokasi sumber daya, serta hasil yang dicapai dari penggunaan dana tersebut. Pertanggungjawaban ini memberikan kejelasan kepada masyarakat atau publik mengenai dampak dari penggunaan dana public (Swasanany, 2020, h. 48).

### **3. Teori Manajemen Risiko**

#### **a. Definisi Manajemen Risiko**

Teori manajemen risiko menurut irham fahmi merupakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengelola risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengurangi dampak risiko negatif (kerugian) dan meningkatkan peluang risiko positif (kesempatan) sehingga organisasi dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih baik. Manajemen Risiko adalah suatu pendekatan sistematis dan terstruktur dalam mengidentifikasi, menganalisis, menilai, mengelola, dan memantau risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi, proyek, atau kegiatan pemerintahan (Fahmi, 2020, h. 46).

Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengenali risiko apa pun yang dapat membahayakan tujuan proyek atau organisasi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meminimalkan dampak dari risiko yang mungkin terjadi atau memanfaatkan peluang risiko yang menguntungkan. Sebagai strategi proaktif, manajemen risiko dalam manajemen keuangan dan pembangunan berupaya

mendeteksi, menilai, dan memitigasi risiko yang dapat membahayakan kemampuan organisasi atau pemerintah untuk memenuhi tujuan keuangan dan pembangunannya.

Selain itu beberapa pakar menjelaskan tentang manajemen risiko. Proses mendeteksi, mengevaluasi, dan mengambil kendali keuangan atas risiko yang membahayakan aset dan pendapatan proyek atau perusahaan serta berpotensi menimbulkan bahaya atau kerugian adalah apa yang didefinisikan oleh Smith sebagai manajemen risiko (Smith, 2020, h. 68).

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak terduga yang dapat merugikan perusahaan atau bisnis. Ikatan Bankir Indonesia memberikan definisi risiko secara profesional dalam buku Manajemen Risiko 1 sebagai berikut

- a. "Risiko adalah konsep yang digunakan untuk mengungkapkan ketidakpastian atas peristiwa dan/atau konsekuensinya yang dapat berdampak material terhadap tujuan organisasi," demikian menurut David MC Namee dan Georges Selim.
- b. The Institute of Internal Auditors menyatakan: "Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengganggu pencapaian tujuan. Ekspresi risiko terkait dengan kemungkinan dan konsekuensi.
- c. SNI ISO 31000 menyatakan bahwa risiko yang berdampak negatif karena akan mempersulit pencapaian suatu tujuan atau sasaran organisasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang merupakan contoh ketidakpastian yang mempengaruhi tujuan perusahaan, baik yang bersifat positif maupun negatif, namun perlu diatasi.

Menurut Peter Bernstein dalam bukunya "Against the Gods: The Remarkable Story of Risk," membahas bagaimana pemahaman tentang risiko telah mengubah cara orang membuat keputusan ekonomi dan keuangan. Bernstein menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang baik selalu melibatkan pertimbangan risiko yang mendalam

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, risiko dapat diartikan sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang menimbulkan risiko bagi organisasi atau bisnis dan dapat mengakibatkan kerugian di kemudian hari (Ikatan Bankir Indonesia, 2020, h. 6).

Tugas yang termasuk dalam program manajemen risiko adalah mengidentifikasi risiko yang perlu ditangani, mengkuantifikasi atau memperkirakan besarnya risiko, menyusun strategi untuk mengurangi atau mengendalikan risiko, mengkoordinasikan pelaksanaan program, dan menilai hasil upaya manajemen risiko.

Manajemen risiko membuka jalan bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk beroperasi di tengah ketidakpastian dan kompleksitas. Risiko keuangan melibatkan potensi kerugian finansial yang dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi dan keuangan suatu entitas. BPKP, sebagai lembaga pengawas, memiliki tanggung jawab bisa mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola risiko keuangan timbul oleh konteks pengelolaan dana publik.

Manajemen risiko juga melibatkan perumusan kebijakan dan prosedur yang efektif. BPKP harus memastikan bahwa entitas publik memiliki kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk mengidentifikasi dan menilai risiko, serta merancang rencana mitigasi yang tangguh.

#### **b. Langkah manajemen risiko**

Menurut Joseph dorfhman, Berikut langkah di manajemen risiko dalam instansi pemerintahan sebagai berikut:

- 1). Langkah pertama dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi semua potensi risiko yang dapat mempengaruhi proyek atau program pembangunan dan pengelolaan keuangan. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti perubahan pasar, perubahan regulasi, atau faktor lingkungan.

- 2). Setelah risiko teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi risiko tersebut dalam hal dampak yang mungkin terjadi dan probabilitas terjadinya. Ini membantu menentukan risiko mana yang harus diprioritaskan.
- 3). Setelah risiko dievaluasi, organisasi atau pemerintah mengembangkan strategi pengelolaan risiko. Ini dapat mencakup: Menghindari tindakan yang dapat menyebabkan risiko, mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak risiko, memindahkan risiko ke pihak lain, seperti dengan asuransi, ketika risiko dianggap dapat diterima dan manajemen risiko lebih fokus pada pemantauan.
- 4). Strategi yang telah dikembangkan kemudian diimplementasikan. Ini melibatkan pelaksanaan tindakan-tindakan yang telah dirancang untuk mengelola risiko.
- 5). Manajemen risiko yang efektif memerlukan komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi, dan masyarakat umum. Semua pihak harus berpartisipasi aktif dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko.

Manajemen risiko adalah proses berkelanjutan. Organisasi atau pemerintah harus secara berkala memantau risiko dan mengevaluasi apakah strategi pengelolaan risiko yang diterapkan masih efektif (Dorfman, 2020, h. 60).

### **c. Strategi Manajemen Risiko**

Strategi Manajemen Risiko adalah di teknik bisa dipakaikan pada organisasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, mengelola, dan memantau risiko. Dalam menghadapi ketidakpastian dan potensi risiko, organisasi perlu memiliki strategi dan metode yang tepat untuk mengelolain risiko secara efektif.

Menurut Irham Fahmi, Penerapan strategi Manajemen Risiko yang tepat dapat membantu organisasi dalam menghadapi tantangan dan risiko yang mungkin terjadi, sehingga dapat mencapai tujuan dengan lebih baik dan lebih

aman. Setiap organisasi perlu menyesuaikan strategi dan metode Manajemen Risiko sesuai dengan karakteristik, lingkungan operasional, dan tujuan mereka (Fahmi, 2020, h. 85).

#### **4. Teori Peran Badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP)**

Menurut perannya, ketika dua atau lebih tuntutan diterapkan pada seseorang pada saat yang sama, mereka akan mengalami konflik peran. Artinya, jika mereka memenuhi salah satu tuntutan, mereka akan merasa sulit atau tidak mungkin untuk memenuhi tuntutan lainnya. Fokus dari teori peran adalah pada sifat alamiah manusia sebagai aktor sosial yang mengambil perilaku sesuai dengan peran sosial dan profesional mereka.

Soekanto mendefinisikan peran sebagai komponen dinamis kedudukan, atau pekerjaan yang dilakukan seseorang sesuai dengan kedudukannya. Sederhananya, peran juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan perilaku tertentu yang dikaitkan dengan pekerjaan tertentu. Cara sebuah peran harus dijalankan juga dipengaruhi oleh kepribadian seseorang. Peran yang dijalankan hampir sama terlepas dari tingkat kepemimpinan; pemimpin tingkat atas, menengah, dan bawah semuanya menjalankan tugas yang sama (Soekanto, 2020, h. 220).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga non-kementerian pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab atas tugas-tugas resmi yang berkaitan dengan pengawasan keuangan dan pembangunan. Tugas-tugas ini termasuk mengaudit, memberikan konsultasi, membantu, mengevaluasi, memberantas KKN, dan menawarkan pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan undang-undang yang relevan. Jika presiden menjabat sebagai kepala negara, hasil-hasil proyek keuangan dan pembangunan diungkapkan tanpa penundaan untuk memungkinkan penekanan kebijakan-kebijakan selama masa pemerintahan dan pemenuhan persyaratan akuntabilitas yang diperlukan. Begitu juga dengan anggota pemerintahan lainnya, seperti pemerintah provinsi dan



pemerintah daerah, membutuhkan hasil pemeriksaan BPKP untuk memaksimalkan kinerja lembaga yang menjadi tanggung jawabnya.

Hampir semua pemerintah memberlakukan standar kinerja selain menetapkan peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan gagasan otonomi daerah (Bharata, 2015). Kinerja terlihat dari bagaimana pembangunan dilaksanakan. Pembangunan yang identik dengan tata kelola pemerintahan yang baik harus dilaksanakan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Akuntabilitas dan keterbukaan publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dan menjadi pola perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Menurut Akbar (2012), era reformasi berdampak pada tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengembangan manajemen pemerintahan di Indonesia.

Dalam rangka mengelola dan memelihara administrasi pemerintahan dengan baik, maka dibentuklah BPKP sebagai lembaga internal pemerintah. Hal ini kemungkinan besar terkait dengan kekuasaan presiden yang tercantum dalam UUD 1945 Alinea Keempat, sehingga presiden berkeinginan untuk membentuk suatu unit di bawah kekuasaannya yang memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk mengelola lembaga eksekutif negara dan memastikan terpenuhinya janji-janji APBN yang telah dikomunikasikan kepada menteri/pimpinan lembaga (Hamid, 2020, h. 16).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPKP memiliki kewenangan untuk melaksanakan arahan pemerintah dalam melaksanakan proyek-proyek keuangan dan pembangunan. Hal ini mengimplikasikan bahwa BPKP memiliki tanggung jawab yang sangat luas dan mencakup seluruh bidang pembangunan, sehingga diperlukan suatu struktur organisasi dan metode kerja yang unik yang dapat mengelola seluruh tugas yang

diberikan kepada instansi yang bersangkutan mengingat tugas pengawasan yang diemban BPKP.

Namun demikian tugas-tugas yang tercantum dalam Pasal 20 Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tentang fungsi organisasi dilimpahkan kepada Kepala Bidang Teknis BPKP, antara lain:

- a. Evaluasi, pembuatan, dan penyiapan kebijakan teknis pengawasan internal yang berkaitan dengan inisiatif pembangunan lintas sektor dan akuntabilitas pengelola keuangan;
- b. membuat kebijakan dan pedoman teknis untuk pengawasan internal atas akuntabilitas pengelola keuangan dan program-program pembangunan lintas sektor;
- c. pertanggungjawaban atas pengeluaran keuangan, penerimaan, atau tindakan lain yang biasanya atau kadang-kadang didukung oleh anggaran;
- d. Pengendalian internal untuk perencanaan dan pemanfaatan aset;

Diimplementasikan, tujuan yang dinyatakan dalam Peraturan Presiden tersebut adalah untuk meningkatkan pengawasan industri konstruksi dan menghasilkan hasil pengawasan yang obyektif. Akibatnya, harus ada pengawasan yang dapat dialihkan dari satu unit ke unit yang melaksanakan kegiatan di semua unit organisasi perdana menteri. Pengawas internal adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah pengawas internal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Presiden No. 31, Pasal 1 (Bohari, 2020, h. 123-124).

Berdasarkan dalam Pasal 1 Ayat 1 di atas, bahwa BPKP adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dekat dan mendukung presiden, namun BPKP juga merupakan lembaga yang dapat dikatakan memiliki kedekatan dengan presiden. Pasal 45 Keppres No. 31 Tahun 1983, yang mengakhiri pembahasan mengenai BPKP, menyatakan bahwa pimpinan lembaga ini telah terbuka dengan

presiden mengenai tugas dan fungsi yang akan mereka jalankan, dengan tembusan kepada koordinator ekonomi, moneter, politik, dan keamanan nasional. Hanya sebagai Presiden di bidang Pengawasan, dan Presiden menerima hasil pemilihan.

Tanggung jawab utama pemerintah adalah membantu presiden dalam menggalang semua inisiatif internal dan eksternal BPKP. Pada tingkat tertinggi, presiden sangat membutuhkan sebuah lembaga pengawasan yang difokuskan hanya untuk membantu pemerintah dan departemen dalam hal lintas kinerja. Presiden harus memiliki alat yang diperlukan untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan mengenai nilai tukar mata uang negara yang secara langsung berkaitan dengan tanggung jawabnya.

Meningkatkan peran BPKP sebagai mekanisme kontrol langsung dari presiden akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. memberikan saran dan perbaikan terhadap berbagai masalah yang dihadapi manajemen pemerintah ketika sistem keuangan negara atau daerah pertama kali dibuka (Hamid, 2020, h. 6).

BPKP berperan sebagai APIP yang paling bertanggung jawab kepada presiden dalam melaksanakan pengendalian intern di lingkungan pemerintah Indonesia. Ketika merekrut orang untuk mengisi jabatan di pemerintahan, pengawasan intern merupakan komponen manajemen yang sangat penting. Untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, pengawasan internal diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi ketidakwajaran dalam pelaksanaan kewajiban dan kegiatan (Setyaningrum, 2020, h. 2-3).

Sistem pengawasan tidak melibatkan pembagian kerja yang ketat atau pemisahan kekuasaan sehingga masing-masing kekuasaan dapat dilakukan secara independen. Tetapi pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan dalam konteks pengawasan, harus dilakukan untuk menentukan tanggung jawab keharusan bagi kekuasaan oleh hukum melalui hubungan korelatif secara fungsional (Saidi, 2020, h. 71).

Dalam bahasa Indonesia umum, istilah "pengawasan" berasal dari kata "awas", yang dipahami sebagai penilikan dan penjagaan. Sebaliknya, dalam bahasa Inggris Oxford, "controlling" mengacu pada kemampuan atau wewenang untuk memimpin, mengatur, atau mengawasi. Diinterpretasikan sebagai kekuatan atau kekuasaan untuk mengatur, memerintahkan, atau menggariskan suatu hal.

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Imam Thabrani:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يَتَّقَنَهُ (رواه الطبراني)

Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara Itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas) (Marhum Sayyid, 2001: 34).

Arah kerja yang jelas, landasan yang kokoh, dan cara-cara yang jelas untuk mendapatkannya adalah perbuatan yang dicintai Allah SWT. Bahkan, manajemen merupakan sesuatu yang diwajibkan dalam ajaran Islam dalam arti mengatur segala sesuatu agar terlaksana dengan baik, tepat, dan tuntas.

Lain pengawasan dalam Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Dijelaskan pula dalam Hadits Nabi Muhammad SAW bahwa dianjurkan untuk mengutamakan pengawasan dan beberapa bentuk evaluasi dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Islam menyajikan gambaran yang sangat indah karena dibutuhkan banyak kehati-hatian berupa pengawasan diri sebelum mengawasi orang lain.

Imam Nawawi (2002: 25) mencantumkan sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Ya'la, Rasulullah SAW bersabda:

إن الله كتب الإحساناً على كل شيء

Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berlaku ihsan atas segala sesuatu (HR. Muslim).

Kata “Isan” mempunyai arti berbuat sesuatu dengan maksimal dan maksimal. Oleh karena itu, segala sesuatunya harus dilakukan secara maksimal, benar dan tuntas

Berdasarkan penjelasan hadis di atas, dalam pengawasan Islam memberikan cara memperbaiki yang salah, memberikan penilaian, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang benar. Dalam Islam, ada dua jenis pengawasan. Yang pertama adalah pengawasan yang dimulai dari diri sendiri yang bersumber dari keimanan kepada Allah SWT dan tauhid. Kepercayaan seseorang terhadap pengawasan Tuhan mempengaruhi dirinya. Artinya, orang tersebut akan selalu memperhatikan perbuatannya. Ketika dia sendirian, dia akan merasa bahwa Allah bersamanya, dan ketika kita bersama, dia pasti akan merasakan bahwa Allah yang ketiga bersamanya.

Untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia secara efektif dan efisien, manajemen sumber daya manusia berusaha mempelajari, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya tersebut. Pada intinya, manajemen adalah upaya untuk mengalokasikan sumber daya dengan cara yang dapat memajukan tujuan bisnis atau organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi, diperlukan perencanaan yang cermat, pelaksanaan yang konsisten, dan manajemen yang berkelanjutan. Tujuan dapat berhasil dicapai dengan baik

Pengawasan oleh Islam merupakan suatu kegiatan manajemen yang menentukan apakah pekerjaan fungsional yang dilaksanakan di lapangan sudah sesuai dengan tujuan pokoknya. Fokus kegiatan pengawasan adalah pada permasalahan, tantangan, dan kerugian seperti pencurian, pelanggaran, dan korupsi. Ar-riqobah yang juga dikenal sebagai proses memudar, adalah salah satu

aspek penting. Latihan ini bertujuan untuk menilai dan menentukan apakah tugas-tugas perencanaan telah diselesaikan atau belum. Selain itu, tujuannya adalah untuk menentukan apakah kegiatan tersebut memiliki cacat, tidak terlalu terorganisir, atau menyebabkan masalah, dalam hal ini perubahan harus dilakukan. Ar-riqobah adalah perlunya perbaikan terus menerus yang harus dilakukan karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas organisasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Berikut ini adalah hadist dari Nabi Muhammad saw: "Beritahukanlah kepada orang lain apa yang kamu ketahui sebelum kamu mengetahui apa yang orang lain ketahui" (Hadis Riwayat At-Tarmizi).

Hukum Islam mendefinisikan tugas pengawasan sebagai hal-hal seperti mempromosikan rencana kerja, menilai dan meningkatkan standar kinerja, dan memastikan bahwa rencana yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi dilakukan di semua tingkatan. Karena pengawasan yang efektif pada dasarnya adalah pengawasan, maka beberapa jenis kontrol harus disertakan ketika mengembangkan sebuah program. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pekerja yang dianggap remeh atau terabaikan. Hasilnya, pengawasan terbaik bergantung pada individu yang menerima pengawasan dan metode pengawasan terbaik.

Pengawasan merupakan topik yang tidak umum dibicarakan ketika membangun sebuah negara, yaitu ketika membangun sistem moneter. Keuangan negara adalah area yang membutuhkan pengawasan karena, jika dibiarkan, dapat menghalangi negara untuk mencapai tujuannya dan bahkan dapat mengakibatkan kerugian (Anggraini, 2020, h. 82-83).

Fungsi pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri dari pengelompokan APBN. Pengawasan yang berkaitan dengan kegiatan APBN meliputi semua langkah prosedur APBN. Pengawasan menghendaki agar pelaksanaan APBN diberikan berkaitan dengan rencana, aturan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam konteks penanganan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, tinjauan BPKP adalah bahwa setiap aspek dan mekanisme yang berkaitan dengan isu tersebut masih berada dalam peraturan perundang-undangan. Kemampuan pemerintahan dalam mengelola keuangan imenjelaskan kapasitas pemerintah dalam menyediakan pendanaan untuk penyelesaian proyek-proyek pembangunan. Dalam rangka menjalankan otonomi, pemerintah harus mempertahankan aparatur yang efisien dan produktif yang dapat menstimulasi keterlibatan masyarakat dalam pendanaan dan pembangunan tu (Mahsun, 2020, h. 235).

Tuntutan pemerintah yang tinggi memiliki banyak tujuan untuk pengukuran kinerja. Tujuan utama dari hal ini bukanlah untuk meningkatkan produktivitas karyawan atau kredibilitas pemerintah. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah ditugaskan untuk mengembangkan lingkungan kerja yang baik. Pencapaian negara erat dengan peran pemerintah dalam mengelola ekonomi, untuk mengevaluasi kinerja pemerintah berdasarkan standar kinerja.

Menerapkan gagasan value for money saat memulai proyek membantu meningkatkan kualitas dan profesionalisme sektor publik. Bagi perusahaan sektor publik, value for money adalah gagasan yang dibangun berdasarkan tiga komponen utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian, memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk menegakkan otonomi daerah merupakan prasyarat bagi profesi keuangan yang sukses (Harmain, et al., 2016, h. 4).

Dengan menciptakan sistem pengawasan yang efektif, pengawasan merupakan cara yang paling efisien untuk membangun dan mempertahankan legitimasi publik terhadap program-program pemerintah dalam hal akuntabilitas publik. Sebagai fungsi manajerial, tindakan pengawasan sangat membantu dalam menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan setelah konsepsi dan pelaksanaan proyek. Keberhasilan harus dipertahankan dan, jika perlu, ditingkatkan sesuai dengan peraturan yang mengatur manajemen dan administrasi di dalam perusahaan atau unit kerja.



## B. Penelitian Terdahulu

Guna mendukung penelitian ini, maka peneliti melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang diteliti.

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil penelitian
1.	Bambang Sudaryono (2020)	Analisis Manajemen Risiko Perusahaan (Enterprise Risk Management) dan Kepatuhan (Compliance) terhadap Kinerja	Menurut penelitian ini, pelaporan audit salah satu BUMN di Jakarta memberikan data empiris tentang dampak risiko dan kepatuhan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kinerja perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan yang hanya mengandalkan kepatuhan.
2.	Siti Ainul Wida, dkk (2019)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi	Perencanaan dan pelaksanaan telah dilakukan sesuai dengan protokol yang relevan, dan pengelolaan telah dilakukan secara akuntabel dan terbuka. Kurangnya transparansi masyarakat menyebabkan tahap pengawasan tidak berjalan dengan baik. Sementara itu, ketiadaan sumber daya manusia yang mumpuni juga menyebabkan tahap

No	Nama	Judul	Hasil penelitian
			pertanggungjawaban tidak berjalan dengan baik. Pemerintah daerah harus memberikan arahan dan pengawasan
3.	Deti Kumalasari & Ikhsan Budi Riharjo (2019)	Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.	Pemerintah Desa Bomo Kecamatan Rogojampi telah memasukkan prinsip-prinsip akuntabilitas ke dalam pengelolaan ADD. Transparansi dan akuntabilitas telah diintegrasikan ke dalam proses perencanaan Alokasi Dana Desa. Kompetensi dalam hal akuntabilitas keuangan dibatasi oleh sumber daya manusia pengelola dana desa.
4.	Masiyah Kholmi (2020)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang	Alokasi Dana Desa Desa Kedungbetik dikelola sesuai dengan Peraturan Bupati No. 17 tahun 2015. Prosedur perencanaan dan pelaksanaannya sejalan dengan kemampuan aparat desa yang belum memadai dan pemahaman yang masih kurang.
5.	Chandra dan	Peran BPKP dalam	FCP terlalu sulit dalam proses

No	Nama	Judul	Hasil penelitian
	Tagora (2018)	pencegahan fraud yang dapat dipraktikkan.	pencegahan kecurangan/fraud di BPKP, jadi penelitian ini mengkaji bagaimana peran BPKP dalam mencegah kecurangan/fraud di BPKP ini.
6.	Pangaribuan (2020)	Implementasi tata kelola pemerintahan, sistem akuntabilitas kinerja, dan manajemen risiko terhadap pendeteksian fraud.	Sistem pengendalian internal sudah perlu mengubah pendekatan hard control menjadi soft control yang mendukung integritas pribadi, moralitas, dan pengendalian diri. Hal ini memperkuat temuan dalam penelitian, yaitu terkait pentingnya penelitian internal dalam membangun kredibilitas karyawan dan mencegah terjadinya kecurangan. Praktik manajemen risiko yang lemah, mengindikasikan sistem pengendalian intern yang kurang efektif dalam mendeteksi dan mencegah sinyal fraud. Jadi perlu diatasi dengan masalah penelitiannya.
7.	Hardini Wulandari (2020)	Peran Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	Tantangan pengawasan berasal dari Sumber Daya Manusia (SDM). Belum adanya

No	Nama	Judul	Hasil penelitian
		Perwakilan Sumatera Utara.	kualifikasi SDM yang dibutuhkan masih rendah dari segi kompetensi, dan kurangnya kesadaran SDM terhadap pengawasan yang dapat berakibat pada pengawasan yang menghasilkan masalah dalam pengawasan keuangan dan pembangunan. Akibatnya timbul penyimpangan-penyimpangan yang menimbulkan kerugian bagi negara.
8.	Utami Dewi (2020)	Kedudukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam penentuan unsur kerugian keuangan Negara dalam kaitannya dengan optimalisasi pengawasan pengelolaan keuangan daerah.	BPKP memainkan peran yang sangat besar dalam pengawasan pembangunan dan keuangan di Indonesia sehingga banyak isu pengawasan yang muncul. Masalah pengawasan pembangunan dan keuangan ini menimbulkan sejumlah tantangan. Menurut temuan studi, dominasi lembaga pengawasan eksternal dan opini sumber daya manusia yang kurang baik terhadap pengawasan merupakan hambatan pertama dalam

No	Nama	Judul	Hasil penelitian
			pengawasan
9.	Naomi catherine felencia (2022)	Pengawasan dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi keuangan negara sesuai dengan undang-undang BPKP. Penyelewengan keuangan yang dikenal sebagai korupsi dan BPJS kesehatan terjadi di negara bagian. pemantauan, terutama dalam kasus-kasus korupsi
10.	Hadi (2019)	Peran badan pengawas keuangan dan Pembangunan dalam pencegahan korupsi	BPKP memiliki langkah aktif untuk memerangi korupsi. Karena korupsi merupakan perilaku yang membahayakan lembaga atau organisasi, BPKP akan mengambil tindakan untuk menghentikannya. BPKP Provinsi Timur secara aktif terlibat dalam memberikan pendidikan terkait faktor risiko korupsi, mengembangkan sistem rencana pengendalian kecurangan, dan mengambil langkah-langkah lain untuk mengurangi insiden terkait korupsi. Menurut studi tersebut, beberapa dari proyek-

No	Nama	Judul	Hasil penelitian
			proyek ini telah selesai. Namun, masih ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan, seperti ketika seorang auditor sering dihubungi dan lambatnya anggaran.

Persamaan dan Perbedaan :

Perbedaan penelitian dahulu dengan penelitian sekarang pada letak itu ialah objek dan metode penelitian ya dilakukan di desa dan metode digunakan kuantitatif, sedangkan di penelitian sekarang itu objek penelitian nya BPKP dengan metode digunakan kualitatif.

Sedangkan

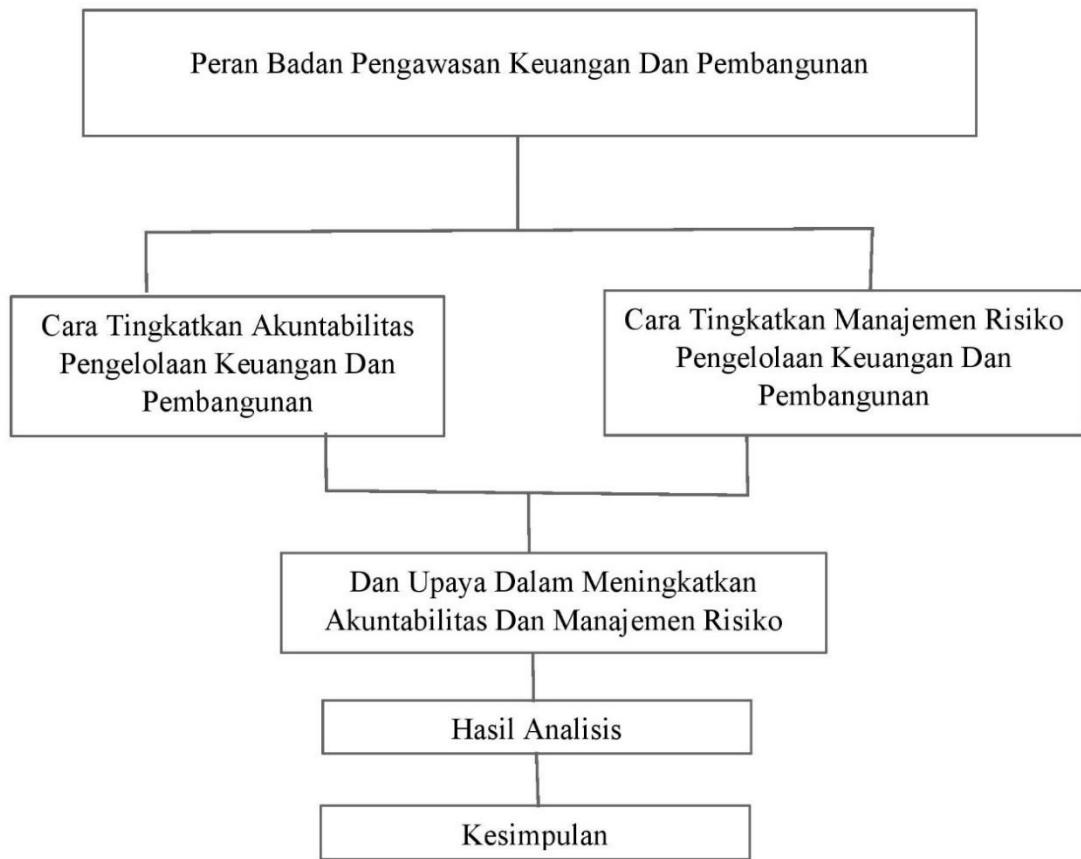
Persamaan penelitian dahulu dengan penelitian sekarang pada judul sama mengenai peran BPKP, Akuntabilitas, Manajemen Risiko dan Pengelolaan keuangan dan pembangunan negara/daerah.

Antara persamaan dan perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang tujuannya itu agar bisa mengembangkan penelitian ilmiah lebih baik, kualitas dan memberi amalan untuk peneliti selanjutnya.

### C. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan model dirancang secara sistematis berisi masalah saling berhubungan serta dirancang untuk memudahkan melakukan penelitian sebagai pemecahan masalah penelitian.

Berikut Kerangka Teoritis penelitian ini ialah



**Gambar 2. 1 Kerangka Teoritis**